

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**YOGI ARIANTO
NIM. 19 402 00235**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**YOGI ARIANTO
NIM. 19 402 00235**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

YOGI ARIANTO
NIM. 19 402 00235

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DSL' with a flourish, positioned above the name of the first supervisor.

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN: 2012058401

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AMN' with a flourish, positioned above the name of the second supervisor.

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN: 2104118301

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal: Skripsi
An. Yogi Arianto

Padangsidempuan, Desember 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n. **Yogi Arianto** yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

PEMBIMBING II



Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN.2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yogi Arianto**
NIM : 19 402 00235
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Oktober 2023
Saya yang Menyatakan,



Yogi Arianto
NIM. 19 402 00235

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yogi Arianto
NIM : 19 402 00235
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 09 Oktober 2023
:nyatakan,



Yogi Arianto
NIM. 19 402 00235



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Yogi Arianto
NIM : 19 402 00235
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Hamni Fadillah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Hamni Fadillah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Rosnani Siregar, M.Ag.
NIDN. 2026067402

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 20 November 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 73 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera
Utara**

Nama : **Yogi Arianto**

NIM : **19 402 00235**

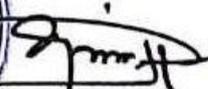
Index Prestasi Kumulatif : **3, 33**

Predikat : **Sangat Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 06 Januari 2023
Dekan,




Darwis Harahap, S.H.L., M.Si.

19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Yogi Arianto
Nim : 19 402 00235
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara**

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sedangkan belanja modal mengalami penurunan, hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami kenaikan maka belanja modal juga mengalami kenaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di provinsi Sumatera Utara. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga ikut mengalami kenaikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada situs Kementerian Keuangan. Penelitian menggunakan *purposive sampling* sebanyak 50 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu Eviews 10. Berdasarkan hasil penelitian ini uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara. Dan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Name : Yogi Arianto
Number : 19 402 00235
**Thesis title : The Influence of Regional Original Income and Funds
Balancing Capital Expenditures in the Province
North Sumatra**

The background to the problem in this research is that Regional Original Income and Balancing Funds in North Sumatra province have increased while capital expenditure has decreased, this is not in accordance with the theory which states that if Regional Original Income and Balancing Funds have increased then capital expenditure has also increased. The aim of this research is to determine the effect of local revenue and balancing funds on capital expenditure in the province of North Sumatra. The discussion of this research is related to the field of economics. The theory in this research is related to the theory regarding Regional Original Income, Balancing Funds and Capital Expenditures. If Regional Original Income and Balancing Funds increase, Capital Expenditures will also increase. This type of research is quantitative research. This research was obtained from financial reports on the Ministry of Finance website. The research used purposive sampling of 50 samples. The data analysis techniques used are normality tests, panel data model selection tests, classical assumption tests, and hypothesis tests. This research was analyzed using statistical tools, namely Eviews 10. Based on the results of this partial test research, it can be concluded that the Regional Original Income variable has no effect on Capital Expenditures in the province of North Sumatra. The Balancing Fund variable influences capital expenditure in the province of North Sumatra. And the variables of Original Regional Income and Balancing Funds simultaneously influence Capital Expenditures in the province of North Sumatra.

Keywords: Balancing Fund, Capital Expenditure, Original Regional Income

خلاصة

الاسم يوغي أريانتو

نيم : ١٩٤٠٢٠٠٢٣٥

عنوان الأطروحة يؤثر على الإيرادات والأموال الأصلية الإقليمية

التوازن مقابل النفقات الرأسمالية في المحافظات

سومطرة الشمالية

خلفية المشكلة في هذا البحث هي أن الدخل الأصلي الإقليمي وصناديق التوازن في مقاطعة شمال سومطرة قد زاد بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهذا لا يتوافق مع النظرية التي تنص على أنه إذا زاد الدخل الأصلي الإقليمي وصناديق التوازن فإن رأس المال قد زاد كما زاد الإنفاق الهدف من هذا البحث هو تحديد تأثير الإيرادات المحلية وموازنة الأموال على الإنفاق الرأسمالي في مقاطعة شمال سومطرة وتعلق مناقشة هذا البحث بمجال الاقتصاد ترتبط النظرية في هذا البحث بالنظرية المتعلقة بالدخل الأصلي الإقليمي وموازنة الأموال والنفقات الرأسمالية إذا زاد الدخل الأصلي الإقليمي وصناديق التوازن، ستزداد النفقات الرأسمالية أيضاً هذا النوع من الأبحاث هو بحث كمي، وقد تم الحصول على هذا البحث من التقارير المالية الموجودة على موقع وزارة المالية استخدم البحث أخذ عينات قصدية مكونة من خمسين عينة تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي اختبارات الحالة الطبيعية، واختبارات اختيار نموذج بيانات اللوحة، واختبارات الافتراضات الكلاسيكية، واختبارات الفرضيات تم تحليل هذا البحث باستخدام الأدوات الإحصائية، وهي وبناء على نتائج هذا البحث الاختباري الجزئي، يمكن استنتاج أن متغير الدخل الأصلي الإقليمي ليس له أي تأثير على النفقات الرأسمالية في مقاطعة شمال سومطرة يؤثر متغير صندوق التوازن على الإنفاق الرأسمالي في مقاطعة شمال سومطرة وتؤثر متغيرات الدخل الإقليمي الأصلي وصناديق التوازن في نفس الوقت على النفقات الرأسمالية في مقاطعة شمال سومطرة

الكلمات المفتاحية: الإنفاق الرأسمالي، صندوق الموازنة، الدخل الإقليمي الأصلي

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Delima Sari Lubis, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Hamzah Nasution dan Ibunda Siti Romayan Hasibuan tercinta yang telah menjadi orangtua terhebat yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan, perhatian, materi demi kesuksesan studi sampai saat ini, dan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan untuk putranya ini. Serta kakak dan adik saya, Kakak Isma khairani, Isro Hayati, Jumidah Maulida yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal _Alamiin
8. Terima kasih kepada sahabat terbaik peneliti, Yasin Al-hasyim Siregar, M. Syukri, Etong Sende Tua, Muhammad Ishak Pulungan, Halomoan, Hendri Siregar, Ali Candra, Rizki Al-barkah dan teman-teman di kelas Ekonomi Syariah 6 serta seluruh teman-teman Seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, 09 Oktober 2023

Peneliti,



YOGI ARIANTO
19 402 00235

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	’	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘al	’	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En ‘
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rankap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ...ا...َ...ي	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
...ِ...ي	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
...ُ...و	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasinya untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (tasyidid)

Syaddah atau *tasyidid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasyidid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Definisi Operasional Variabel.....	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kerangka Pikir	8
1. Belanja Modal	8
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
a. Pengrtian Pendapatan Asli Daerah	11
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	12
c. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal	15
3. Dana Perimbangan	16
a. Dana Bagi Hasil.....	17
b. Dana Alokasi Umum.....	18
c. Dana Alokasi Khusus	19
d. Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal	20
4. Pengeluaran/Belanja dalam Prespektif Ekonomi Islam	21
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	32
a. Populasi	32
b. Sampel.....	33
D. Instrument Pengumpulan Data.....	33

E. Teknik Analisis Data.....	34
1. Uji Normalitas.....	34
2. Analisis Regresi Data Panel.....	35
a. Model <i>Common Effect</i>	35
b. Model <i>Fixed Effect</i>	35
c. Model <i>Random Effect</i>	36
3. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Multikolinearitas.....	39
b. Uji Autokorelasi.....	39
4. Uji Hipotesis.....	40
a. Uji Parsial (Uji t).....	40
b. Uji Simultan (Uji F).....	40
5. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	40
6. Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara.....	42
1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara.....	42
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.....	43
3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara.....	44
B. Deskripsi Data Penelitian.....	44
1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.....	45
2. Dana Perimbangan di provinsi Sumatera Utara.....	46
3. Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara.....	47
C. Hasil Analisis Data.....	47
1. Uji Normalitas.....	48
2. Pemilihan Model Analisis Data.....	48
a. Uji <i>Chow</i>	48
b. Uji <i>Hausman</i>	49
3. Uji Asumsi Klasik.....	50
a. Uji Multikolinearitas.....	50
b. Uji Autokorelasi.....	51
4. Uji Hipotesis.....	52
a. Uji Parsial (Uji t).....	52
b. Uji Simultan (Uji F).....	53
5. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	54
6. Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
E. Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi.....	62
C. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Tahun 2018-2022	3
Tabel. I.2	Definisi Operasional	5
Tabel. II.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel.IV.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara	45
Tabel. IV.2	Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara	46
Tabel. IV.3	Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara	47
Tabel. IV.4	Uji Chow	49
Tabel. IV.5	Uji <i>Hausman</i>	49
Tabel. IV.6	Uji Multikolinearitas	50
Tabel. IV.7	Uji Autokorelasi	51
Tabel. IV.8	Hasil Uji t	52
Tabel. IV.9	Hasil Uji F	53
Tabel. IV.10	Uji R Square	54
Tabel. IV.11	Analisis Regresi Berganda	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar. II.1	Kerangka Pikir	30
Gambar. IV.1	Uji Normalitas.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran 2 Data Dana Perimbangan
- Lampiran 3 Data Belanja Modal
- Lampiran 4 Uji Asumsi Dasar
- Lampiran 5 Analisis Regresi Data Panel
- Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik
- Lmapiran 7 Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, Kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.¹

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah, serta pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif.²

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah melalui pengeluaran Belanja Modal dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambah aset tetap yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Belanja

¹ Yoyo Sudarjo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017).hlm.91.

² kawedar, *Akuntansi Sektor Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018).hlm.77.

modal akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya administrasi umum.¹ Besarnya Belanja Modal setiap daerah berbeda- beda sesuai dengan luasnya daerah dan kebutuhan daerah. Realisasi Belanja Modal pada masing-masing daerah dapat menunjukkan kemajuan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, masih terdapat anggaran Belanja Modal yang kurang direalisasikan secara maksimal untuk pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kerusakan jalan, drainase, dan fasilitas yang menunjang aktivitas publik di berbagai daerah.

Alokasi Belanja Modal dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.² Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah untuk membiayai belanja daerah.³ Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Modal yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya dimana rata-rata

¹ Asmara J dan Nufus H, "Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi Pada Kab/kota di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 9 (2017), hlm.5.

² Wandira A, "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," 2013, hlm.45.

³ Juniawan dan Suryantini, "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal di Provinsi Bali," *E-Jurnal Manajemen.*, hlm.1255.

Belanja Modal hanya mendapatkan persentase sebesar 18% dari total PAD pada kabupaten/kota pada Provisi Sumatera Utara tahun 2021.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Tabel I.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Belanja Modal Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Persentase
2018	5.638.960.000.000	7.055.130.000.000	1.564.900.000.000	28%
2019	5.761.270.000.000	7.300.650.000.000	1.249.600.000.000	22%
2020	5.531.240.000.000	7.347.750.000.000	1.497.940.000.000	27%
2021	6.402.710.000.000	7.518.180.000.000	1.141.200.000.000	18%
2022	7.258.020.000.000	5.250.010.000.000	1.775.920.000.000	24% ⁴

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.

⁴ Sumber data PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, www.djpk.kemenkeu.go.id, (diakses pada tanggal 12 Maret 2023)

Pada tahun 2019 dan tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terjadi kenaikan sedangkan Belanja Modal terjadi penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori amin yang menyatakan bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal berbanding lurus. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan naik maka Belanja Modal ikut naik.⁵

Berdasarkan permasalahan dari berbagai paragraf sebelumnya. Peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka judul skripsi ini yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Modal yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya dimana rata-rata Belanja Modal hanya mendapatkan persentase sebesar 18% dari total PAD pada kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.
2. Transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan

⁵ Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Teoritis, Normatif, Dan Empriris* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 67.

Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, dimana pemanfaatan Dana Perimbangan dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perludilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dengan metode analisis data panel pada kota di provinsi Sumatera Utara periode penelitian tahun 2018-2022

D. Defenisi Operasional Variabel

Mengingat permasalahan yang luas, dimana kemampuan yang dimiliki peneliti terbatas serta untuk menghindari beberapa kesalahan-kesalahan dalam memahami masalah. Untuk itu peneliti memberikan defenisi operasional variabel dalam penelitian adalah:

Tabel I.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Semau hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih periode anggaran tertentu.	Total Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Dana Perimbangan (X2)	Dana yang bersumber daei APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Total Dana Perimbangan	Rasio

Belanja Modal (Y)	Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	Total Belanja Modal	Rasio
-------------------	--	---------------------	-------

E. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

3. Bagi UIN Syahada Padangsidempuan

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di pemerintah daerah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yg lebih luas bagi masyarakat dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dengan kata lain Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.¹¹ Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, peatangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan

¹¹ Wa Ariadi, *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).hlm. 35.

dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap dipakai.²

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat nilai aset dan diatas batas minimal nilai kapitalis jalan dan jembatan, irigasi dan

² Didin Fatihudin, *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).hlm. 65.

jaringan.³

e. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan Belanja Modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam Belanja Modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam Belanja Modal ini adalah Belanja Modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Berdasarkan Permendagri Np. 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,

³ Nelly Masnila, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Solok: Cendekia Media, 2021). hlm.76.

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dirasakan oleh masyarakat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah serta sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut sesuai Peraturan Daerah sesuai menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemda atas pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada warga, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemda. PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemda, PAD bisa dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi wilayah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.²

⁴ “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1,” 2004.

² Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Puastaka Kobor Indonesia, 2017).hlm.20.

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah.⁶

b. Sumber pendapatn PAD meliputi :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan buat membiayai

Berdasarkan Damas Dwi Anggoro pengertian pajak daerah yaitu, pajak-pajak yang ditentukan pemeungutannya pada Peraturan Daerah, serta para pembayar pajak (harus pajak) tidak menerima imblan secara langsung dari pemda.⁷

Pajak daerah menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah diperlukan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, buat menaikkan dan memeratakan kesejahteraan warga. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu bisa mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 daerah

⁶ Rini Hayati Lubis dan Fitriani, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 6, no. 2 (2018), hlm 120.

⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017).hlm.46.

kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan memutuskan jenis pajak selain yang sudah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan serta sinkron menggunakan aspirasi rakyat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- b) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
 - c) Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - e) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
 - f) Potensinya memadai;
 - g) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
 - h) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
 - i) Menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸ Pengertian lain retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas. Adapun jenis-jenis retribusi daerah antara lain, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.⁹

3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.¹⁰ Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011).hlm.15.

⁹ Esti Purwaningsih, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008* (Surakarta, 2011).hlm.36.

¹⁰ Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau," *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* 7, no. 2 (2015), hlm. 260.

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik penda.¹¹

c. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan

¹¹ Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanic, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 7.

kebijakannya.¹² Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha yang terus-menerus berlanjut agar PAD tersebut terus meningkat. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.¹³

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹⁴

¹² Nur Kholis and Moh Khusaini, "*Penganggaran Sektor Publik* ", (Malang: UB Press, 2019).Hlm.27

¹³ Wahyu Hidayat, "Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan Di Jawa Timur" (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).hlm.83

¹⁴ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintah* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 599.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan UU No.33 Tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.¹⁵

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ialah dana yang bersumber berasal APBN yang dialokasikan pada daerah sesuai angka persentase buat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari:

- a) Kehutanan,
- b) Pertambangan umum,
- c) Perikanan,
- d) Pertambangan minyak bumi,
- e) Pertambangan gas bumi, dan
- f) Pertambangan panas bumi.

¹⁵ Anwar Sadat, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).hlm. 115.

¹⁶ Muslim Afandi dan Syed Agung, *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi* (Yogyakarta: Tunas Gemilang, 2018).hlm. 49.

Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasikan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.¹⁷ Dana alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan kepada setiap organisasi. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁸

Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk

¹⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).hlm. 175.

¹⁸ Resa Dwi Ayu Pengasti Muliono, Galih Wicaksono, dan Nitri Mirosea, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). hlm.83.

meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata. Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah yang penggunaannya telah ditentukan.¹⁹ Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.²⁰

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun menjadi prioritas nasional sehingga APBN memberikan

¹⁹ Sadat, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. hlm.80.

²⁰ Wulan Riyadi, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2022), hlm.300.

tambahan dana berupa DAK kesehatan dan DAK pendidikan. DAK juga khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

d. Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

1) Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Hasil penelitian Sianipar menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan Belanja Modal.²¹ Akibatnya, terjadi transfer dana yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dasar secara umum. DAU juga dapat digunakan untuk mendanai Belanja Modal, seperti pembangunan sarana dan prasarana sebagai bagian dari penyediaan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU ini untuk membayar Belanja Modal. Besarnya nilai DAU dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Pemerintah Daerah. Sulistyowati menemukan pengaruh yang positif antara DAU dan Belanja Modal.²²

²¹ Eva Septriani Sianipar, "Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017, hlm. 40.

²² Herman Hidayat, "*Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*" (Jakarta: LIVI Press Dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).hlm.192

2) Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK merupakan faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja daerah melalui DAK terkait dengan Belanja Modal dan penyediaan uang transfer dari pemerintah pusat. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.²³

3) Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

DBH yang ditransfer dari pemerintah pusat terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Hasil penelitian Rahmayani menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DBH dengan Belanja Modal. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku Belanja Modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Bagi hasil yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran

²³ Yuswar Zainul Basri and Subri Mulyadi, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Edisi 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 83-84.

DBH meningkat maka alokasi Belanja Modal juga meningkat.²⁴

4. Pengeluaran/Belanja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder (*al hajjat, al kamaliyyah*), sesuai kadar kemampuannya. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan pokok dalam syariat Islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dijelaskan dalam surah Al- Maidah ayat 67:

²⁴ Primandita Fitriandi, *Bunga Rangkai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).hlm.12

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَاتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ❁

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir”.¹⁹

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, yaitu ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk memberikan kabar kepada manusia akan apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada Rasul. Ajaklah mereka untuk mengikutinya. Jangan takut disakiti oleh seseorang. Bila kamu takut, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Sebab kamu telah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada semua.²⁰

Jika ayat tersebut dianalogikan secara sederhana (tidak bermaksud menafsirkan), bahwa menyampaikan informasi yang memang menjadi kewajiban dari seorang pemimpin terhadap rakyat, atau badan publik kepada pengguna informasi publik (masyarakat), sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan/pengelolaan keuangan negara, adalah merupakan kewajiban yang bernilai Islami sebagaimana ayat di atas.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2009).

²⁰ Khasan Bisri, *Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, Metode Kisah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam : Seri Antologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Nusamedia, 2021). hlm.8.

Penyelenggara pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang menggunakan anggaran negara (badan publik), termasuk belanja negara menurut Islam wajib menerapkan konsep *shidq* (jujur) dan amanah. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diadakan oleh badan publik tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan.

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudharrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghiyurm* bi *al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dantanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.²²

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapatdibagi menjadi tiga bagian:

²² Hendri Hermawan Adinugraha, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2023). hlm.145.

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumberdananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.²³

Adapun kaidah Islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel II.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Luh Putu Dita Silviani, Jurnal (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, budget ratcheting mempunyai sifat moderasi, memperkuat pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal dan pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal. ²⁵

²³ Rifadli D.Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022). hlm. 207

²⁴ Muhammad Fauzan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khottab," *Jurnal Human Falah* 4, no. 1 (2017), hlm. 55.

²⁵ Ni Luh Putu Dita Silviani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Riset Akuntansi* 12, no.2 (2023).

2	Ririn Anggreani, Skripsi (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di ParePare	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. ²⁶
3	Ikhwan Prasetyo, Skripsi (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016	PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAU dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. ²⁷
4	Noor Aini Arifah, Jurnal (2019)	Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. ²⁸
5	Muhammad Syukri dan Hanaya, Jurnal (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y).

²⁶ Ririn Anggreani, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan, *Skripsi*. Pare Pare : Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022.

²⁷ Ikhwan Prasetyo, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016, *Skripsi*. Padang : Universitas Negeri Padang, 2019.

²⁸ Noor Aini Arifah, "Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017", *Journal of Accounting* 8, no.2, (2019).

		Selatan	Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi. ²⁹
--	--	---------	---

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ni Luh Putu Dita Silviani yang berjudul Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Belanja Modal dan memiliki variabel yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sedangkan perbedaannya adalah pada

²⁹ Muhammad Syukri dan Hanaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Economic, Managemeny and Accounting* 2, no.2, (2019).

penelitian ini memiliki hasil yang berbeda yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ririn Anggreani yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di ParePare. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Belanja Modal dan memiliki variabel yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki hasil yang berbeda yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
3. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ikhwan Prasetyo yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Belanja Modal dan memiliki variabel yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
4. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Noor Aini Arifah yang berjudul Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Belanja Modal dan memiliki variabel yang sama yaitu Pendapatan

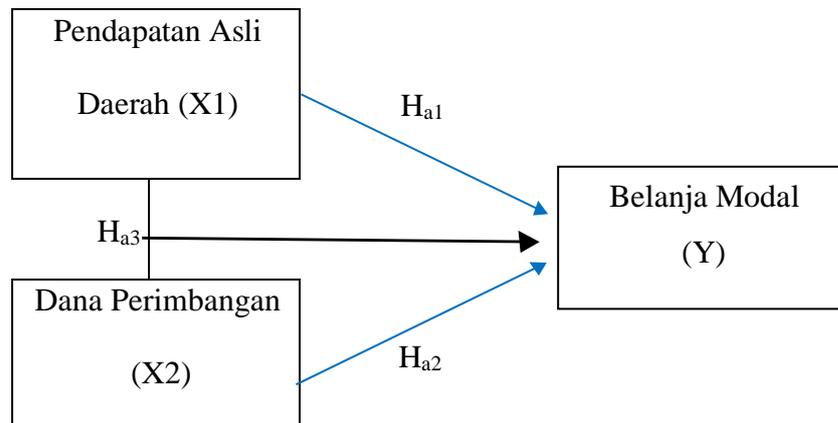
Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel Sisa Anggaran.

5. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Muhammad Syukri dan Hanaya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Belanja Modal dan memiliki variabel yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Gambar 4 menyajikan kerangka konseptual untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel penelitian ini yaitu variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan untuk variabel tambahan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel Belanja Modal.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Keterangan :

- Pengaruh Parsial (Secara Individual)
- Pengaruh Simultan (Secara Bersama sama)

- H1 Pengaruh X1 Terhadap Y
- H2 Pengaruh X2 Terhadap Y
- H3 Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H_{01} : Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.
- H_{a1} : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.
- H_{02} : Tidak terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.

- H_{a2} : Terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.
- H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.
- H_{a3} : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di provinsi Sumatera Utara terkait dengan pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang datanya di peroleh pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini dilaksanakan pada industri keuangan ekonomi syariah. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2023 sampai Oktober 2023.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penggunaan catatan dalam bentuk angka untuk mengelola atau bekerja dengan angka, yang informasinya berupa angka (nilai atau peringkat, peringkat atau frekuensi), yang dapat dianalisis menggunakan fakta untuk menjawab pertanyaan regresi dengan variabel moderasi. Yaitu menggunakan alat bantu statistik paling utama dalam memberikan gambaran atas suatu peristiwa atau gejala, baik statistik deskriptif maupun inferensial.

C. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan

atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.¹ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini memiliki dua makna, yaitu (1) semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel, dan (2) sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil (miniatur populasi). Artinya besar sampel harus mencukupi untuk menggambarkan populasinya.² Untuk menentukan sampel-sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten ataupun Kota dengan belanja modal tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sampel penelitian ini yaitu 5 kota, 5 kabupaten dan selama 5 tahun di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 sehingga banyak sampel yang digunakan sebanyak 50 sampel.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan harapan, maka teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

¹ Eddy Roflin, *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement, 2021).hlm.5.

² Roflin.hlm.11.

Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau buku-buku yang terkait dengan variable penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.³ Dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Dan data yang digunakan adalah data panel. Periode penelitian tahun 2018-2022.

E. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul. Maka dilakukan pengolahan data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Eviews

10. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen ataukah keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk

³ Iman Supriadi, *Metode Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm.164.

mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak.⁴

2. Analisis Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *crosssection*. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu ataupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Model *Fixed Effect*

Istilah *fixed effect* menunjukkan walaupun intercept mungkin berbeda untuk setiap individu, tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu, sehingga dalam model *fixed effect* juga diasumsikan bahwa koefisien slope tidak bervariasi baik terhadap individu

⁴ Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: Uin Malang Press, 2019). hlm.178.

maupun waktu (konstan). Agar intersep dapat bervariasi untuk setiap individu maka dapat dilakukan dengan Teknik variable Dummy atau variable boneka.⁵

c. Model *Random Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasikan oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *error component model* (ECM). Dalam metode *ordinary least square* (OLS) tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effect*. Sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *generalized least square* (GLS) dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*.

Untuk memilih model yang paling tepat yang digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan menurut Gujarati yakni:

1) *Uji Chow*

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *common effect* lebih baik dari regresi model data panel metode *fixed effect*. Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari pvalue dari statistic. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0

⁵ Zulaika Matondang dan Hamni Fadhilah Nasution, *Praktis Analisis Data: Pengelolaan Ekonometrika Dengan Eviews dan SPSS* (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2021).hlm.137.

ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *fixed effect*.

2) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*. Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *fixed effect* model, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya dalam model estimasi regresi data panel yang sesuai adalah model *random effect*.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Kriteria pengujian yaitu dengan menggunakan metode *Breusch Pagan* dengan melihat nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya jika pengujian menyatakan nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *random effect*.

Uji lagrange multiplier hanya digunakan saat *uji chow* dan *ujihausman* menunjukkan hasil yang berbeda, dimana *uji chow* menunjukkan model yang digunakan adalah *common effect* sedangkan uji hausman menunjukkan model yang digunakan adalah *random effect*, maka diperlukan pengujian menggunakan *lagrange multiplier*. Namun jika hasil *uji chow* dan *uji hausman* menunjukkan hasil yang sama, maka *uji lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan.

Analisis regresi adalah kelanjutan analisis setelah uji validitas, reliabilitas, ujiasumsi klasik. Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah:⁶

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

Y = Variabel Belanja Modal

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi Linear Berganda

e = Standard Error

X_1 = PAD

X_2 = DP

⁶ Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Futuhul Hadi, dan Dian Anggraeni, "Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Timur Tahun 2006-2015" 18, no. 2 (2018). hlm.70.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Menurut Dwi Priyatno, Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Independent) yang terdapat dalam model thubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi memiliki 1 regresi yang sempurna harusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya.⁷

- 1) Jika Auxilary $> 0,80$ maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika Auxilary $< 0,80$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi pada suatu model regresi. Tetapi uji ada tidaknya autokorelasi yang paling banyak digunakan adalah uji Durbin Watson (Uji DW). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:⁸

- 1) Apabila DW antara $0-dL$ atau $(4-dL)-4$ maka ada autokorelasi positif atau negatif.
- 2) Apabila DW antara $dL-dU$ dan $(4-Du)-(4-dL)$ maka terletak di daerah keragu-raguan.
- 3) Apabila DW antara dU dan $4-dU$ maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

⁷ Dwi Priyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014). hlm.89.

⁸ Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014).hlm. 61.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Signifikan (Uji-t). Menurut Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (Responsiveness, Tangible dan Empathy) terhadap variabel terikat (Kepuasan Pelanggan) secara terpisah atau parsial.⁹ Ketentuan dalam uji t adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima H_0 ditolak

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ketentuan uji F adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.¹⁰

⁹ Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19* (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2011).hlm.98.

¹⁰ Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, 2019.hlm.182.

5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu.¹¹

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹²

Dimana :

$$BM = a + b_1PAD + b_2DP + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

a : Konstanta

b₁ b₂ : Koefisien Regresi Linear Berganda

e : Standar Error¹³

¹¹ Sahrial Eendi Nasution, Kamaluddin, dan Rodame Monitorir Napitupulu, "Determinan Minat Berinfak Generasi Z di IAIN Padangsidimuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): hlm.49.

¹² Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).hlm.241.

¹³Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, 2019.hlm.181-182.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan

Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

a. Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- 3) Mewujudkan Masyarakat Dalam Pendidikan Sumatera Utara Yang Bermartabat karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- 5) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, peneliti memperoleh data dari laporan keuangan publikasi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan dari website www.djpk.kemenkeu.go.id. memperoleh data sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi. Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Milyar Rupiah)**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gunungsitoli	29.456.354	32.209.121	25.530.252	21.417.950	25.231.747
2	Pematang Siantar	137.052.839	125.018.502	140.047.128	137.849.088	138.279.200
3	Sibolga	81.245.733	69.312.217	79.539.316	76.263.787	118.845.979
4	Tebing Tinggi	114.048.354	105.239.918	90.981.301	82.930.324	109.904.586
5	Padangsidempuan	75.063.575	87.432.283	64.004.142	59.865.657	98.149.646
6	Tapanuli selatan	140.044.217	167.458.157	132.010.127	134.093.420	125.010.000
7	Langkat	136.680.578	167.523.076	168.843.723	158.480.919	138.928.796
8	Padang Lawas Utara	74.306.097	42.929.111	51.975.624	43.312.600	43.150.000
9	Nias Selatan	19.605.734	25.664.883	16.598.894	32.822.654	29.355.548
10	Serdang Bedagai	194.382.972	143.144.170	120.028.357	133.466.455	117.658.930

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

2. Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Utara

Kebutuhan pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan roda pemerintahannya masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Berikut adalah Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Milyar Rupiah)**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gunungsitoli	552.039.778	559.094.823	529.186.588	630.278.972	668.010.000
2	Pematang Siantar	796.804.963	786.015.109	697.311.630	690.917.607	747.430.000
3	Sibolga	512.639.624	786.015.109	464.208.154	479.222.245	417.000.000
4	Tebing Tinggi	540.901.919	547.285.111	507.071.491	540.809.856	488.710.000
5	Padangsidempuan	641.431.373	720.460.184	603.846.645	662.957.395	538.590.000
6	Tapanuli selatan	940.110.738	976.668.586	833.089.565	1.258.196.399	1.129.980.000
7	Langkat	1.722.928.314	1.732.852.882	1.537.931.438	1.891.142.736	940.420.000
8	Padang Lawas Utara	700.703.635	763.032.737	695.572.535	1.014.560.411	1.035.820.000
9	Nias Selatan	771.694.298	859.504.478	968.464.320	1.255.472.466	739.480.000
10	Serdang Bedagai	1.118.880.330	1.077.175.098	1.014.850.332	1,280,626,097	957.040.000

Sumber data : <https://djk.kemenkeu.go.id/>

3. Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Berikut adalah Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Milyar Rupiah)**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gunungsitoli	183.521.284	156.757.286	145.877.614	148.806.251	145.631.533
2	Pematang Siantar	287.958.994	204.959.071	159.563.471	103.469.956	97.800.000
3	Sibolga	142.467.823	81.569.259	86.041.237	87.104.769	129.760.000
4	Tebing Tinggi	203.340.069	153.577.322	149.776.465	169.669.665	132.550.000
5	Padang sidempuan	113.072.061	137.812.393	66.379.049	102.576.205	75.910.000
6	Tapanuli selatan	363.140.233	420.660.057	315.936.844	236.974.942	310.690.000
7	Langkat	380.576.043	346.035.976	296.125.002	279.596.218	301.759.351
8	Padang Lawas Utara	196.036.175	247.484.629	152.155.180	159.569.318	337.950.000
9	Nias Selatan	221.305.834	238.978.343	293.434.513	245.107.576	191.302.931
10	Serdang Begadai	349.104.338	313.357.351	235.397.764	399.621.275	345.580.797

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

C. Hasil Analisis Data

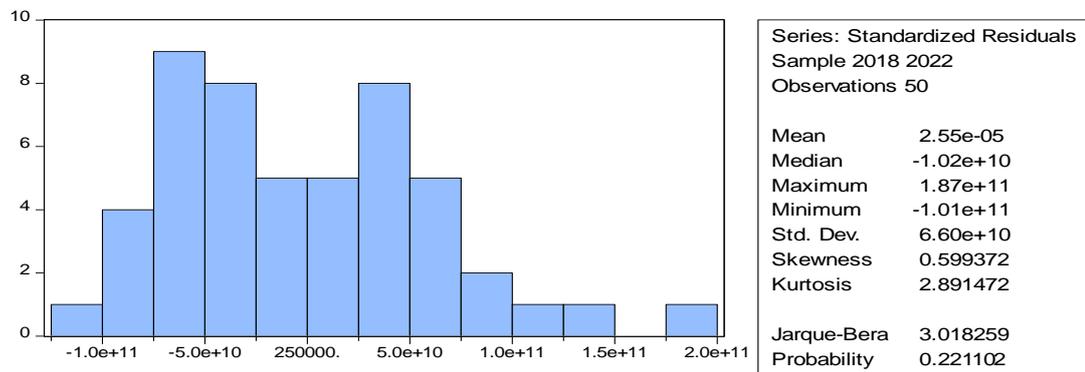
Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul. Maka dilakukan pengolahan data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Eviews

10. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen ataukah keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu:

Gambar IV.1 Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak.¹ Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal ($0,221 > 0,05$).

2. Pemilihan Model Analisis Data

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *common effect* lebih baik dari regresi model data panel metode fixed effect. Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari p value

¹Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, 2019.hlm.178.

dari statistic. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Tabel IV.4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		4.125670	(9,38)	0.0009
Cross-section Chi-square		34.082376	9	0.0001

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Prob $< 0,05$ ($0,0001 < 0,05$), model lebih baik *fixed effect*

Berdasarkan hasil output uji chow di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0001 dengan nilai α 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai probability < 0.05 ($0.0001 < 0.05$), sehingga model regresi yang lebih baik digunakan adalah *model fixed effect*.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*. Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *fixed effect* model, dan sebaliknya apabila nilai

probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya dalam model estimasi regresi data panel yang sesuai adalah model *random effect*.

Tabel IV.5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.437178	2	0.0400

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

prob $< 0,05$ ($0,0400 < 0,05$), model lebih baik *fixed effect*

Berdasarkan hasil output uji *hausman* model yang terpilih yaitu *model fixed effect* dengan nilai probabilitas sebesar 0.0400 dengan nilai α 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai probablity < 0.05 ($0.0400 < 0.05$). Sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas, jika:

Tabel IV.6 Uji Multikolinearitas

	PAD	DP
PAD	1.000000	0.345667
DP	0.345667	1.000000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji multikoleniaritas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel tidak lebih besar dari 0.8 sehingga tidak terjadi multikoleniaritas. Jika Auxilary $< 0,80$ maka tidak terjadi multikoleniaritas.²

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam pengujian model regresi berganda terdapat korelasi antara gangguan pada periode sebelumnya.

Tabel IV.7 Uji Autokorelasi

Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/26/23 Time: 21:03				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
R-squared	0.295561	Mean dependent var	1.75E+11	
Adjusted R-squared	0.265585	S.D. dependent var	7.87E+10	
S.E. of regression	6.74E+10	Akaike info criterion	52.76451	
Sum squared resid	2.14E+23	Schwarz criterion	52.87923	
Log likelihood	-1316.113	Hannan-Quinn criter.	52.80820	
F-statistic	9.859901	Durbin-Watson stat	1.050471	
Prob(F-statistic)	0.000266			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Tidak terjadi autokorelasi

² Asnawi.hlm.176.

Berdasarkan hasil output uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa $-2 < 1.050471 < +2$ sehingga dapat dibuktikan tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial).³

Ketentuan dalam uji t adalah:

- 1) H_0 diterima: Apabila nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- 2) H_0 ditolak : Apabila nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

Tabel IV.8 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji t di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen PAD adalah sebesar 0.291171, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (50-2) = 48$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar

³ Khoiriyah Nasution, Delima Sari Lubis, dan Hamni Fadilah Nasution, "Determinan Keputusan Pembelian Masyarakat di Pasar RayaKodok Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Business Management*, 2019, hlm.6.

1.67722 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.291171 < 1.67722$ sehingga H_a ditolak, maka PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen Dana Perimbangan adalah sebesar 4.057346, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (50-2) = 48$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.67722 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.057346 > 1.67722$ sehingga H_0 ditolak, maka Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Ketentuan uji F adalah:

Tabel IV.9 Hasil Uji F

R-squared	0.295561	Mean dependent var	1.75E+11
Adjusted R-squared	0.265585	S.D. dependent var	7.87E+10
S.E. of regression	6.74E+10	Akaike info criterion	52.76451
Sum squared resid	2.14E+23	Schwarz criterion	52.87923
Log likelihood	-1316.113	Hannan-Quinn criter.	52.80820
F-statistic	9.859901	Durbin-Watson stat	1.050471
Prob(F-statistic)	0.000266		

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji F di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 dengan F_{hitung} sebesar 9.85. Tabel distribusi F dilihat dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ yaitu $50-2 = 48$. Sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 4.04 maka dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9.85 > 4.04$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

Tabel IV.10 Uji R Square

R-squared	0.295561
Adjusted R-squared	0.265585

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji R^2 di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0.295561 atau 29.5561% hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 29.5561% terhadap Belanja Modal.

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah kelanjutan analisis setelah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik. Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah:⁴

$$BM = a + b_1PAD + b_2DP + e \dots\dots\dots (4.2)$$

Keterangan

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

a : Konstanta

b_1 b_2 : Koefisien Regresi Linear Berganda

e : Standar Error.⁵

Tabel IV.11 Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan output analisis regresi berganda di atas maka model regresi berganda antara variabel X terhadap Y dapat dinarasikan dalam model persamaan berikut:

⁴ Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Fatuhul Hadi, dan Dian Anggraeni, "Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)" 18, no. 2 (2018): hlm.70.

⁵ Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN-Malang Press, 2011), hlm. 178.

$$BM = -3.51 + 0,06PAD + 0.23DP + e \dots\dots\dots (4.2)$$

Dari hasil persamaan di atas dapat disimpulkan apabila variable-variabel bebas ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan dan penurunan pada variabel terikatnya. Artinya:

1. Nilai konstanta sebesar -3.51E+09 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen PAD, dan DP maka Belanja Modal provinsi Sumatera Utara sebesar -3.51%.
2. Koefisien PAD sebesar 0.06 artinya apabila PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 0.06.
3. Koefisien DP sebesar 0.23 artinya apabila DP mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 0.23.

D. Pembahasan Hasil penelitian

Judul dari penelitian ini adalah pengaruh perndapatan asli daerah terhadap Belanja Modal provinsi sumatera utara.

Berdasarkan hasil output uji t di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen PAD adalah sebesar 0.291171, dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (50-2) = 48$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.67722 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{tabel} > t_{hitung}$ yaitu $1.67722 > 0.291171$ sehingga H_0 ditolak.

Ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Indra Sulistyaningsih dan Noor Aini Arifah 2019 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Tidak terpengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal dikarenakan Jika dilihat secara keseluruhan PAD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara masih kecil kontribusinya terhadap Belanja Modal. sehingga pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi Belanja Modal.

2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DP adalah sebesar 4.057346, dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (50-2) = 48$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.67722 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.057346 > 1.67722$ sehingga H_0 ditolak, maka DP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara.

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dari Dana Perimbangan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap danaperimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Modal. Semakin besar pendapatan Dana

Perimbangan pada kabupaten/kota semakin besar pula Belanja Modalnya. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Novita Sari (2018) “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Islam”.

3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil output uji F dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 dengan F_{hitung} sebesar 9.85. Tabel distribusi F dilihat dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ yaitu $50-2 = 48$. Sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 4.04 maka dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9.85 > 4.04$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah dan untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Perimbangan ini menyerupai PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Novita Sari (2018) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Islam". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan berpengaruh positif dan signifikan.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar memperoleh hasil yang maksimal. Namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan pada tahun penelitian ini, yaitu pada penelitian ini hanya meneliti dari periode tahun 2018-2022.
2. Keterbatasan dalam pengambilan data dan tahun dalam penelitian ini yang berbentuk sekunder. Dimana peneliti hanya mengambil data laporan keuangan seperlunya.
3. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.
4. Keterbatasan dalam mengambil variabel penelitian, yaitu hanya terfokus pada variabel-variabel PAD, DP dan Belanja Modal saja, tidak memperhatikan variabel lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara. PAD adalah sebesar 0.291171, nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.67722 maka hasilnya $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.291171 < 1.67722$ sehingga H_a ditolak.
2. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel DP (Dana Perimbangan) berpengaruh terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara. DP adalah sebesar 4.057346, nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.67722 maka hasilnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.057346 > 1.67722$ sehingga H_0 ditolak.
3. Berdasarkan uji simultan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan DP berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal provinsi Sumatera Utara. F_{hitung} sebesar 9.85. Tabel distribusi F dilihat dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ yaitu $50-2 = 48$. Sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 4.04 maka dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9.85 > 4.04$, sehingga H_0 ditolak.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Dana Perimbangan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan Belanja Modal.

Implikasi dari penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat meningkatkan Belanja Modal. Hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintahan adalah menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan sehingga dapat meningkatkan Belanja Modal.

C. Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Perimbangan dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Kota Padangsidimpuan supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini periode yang digunakan terbatas pada tahun 2018-2022, hendaknya penelitian selanjutnya lebih memperbaharui dan menambah periode penelitian agar hasil yang didapat lebih releva

DAFTAR PUSTAKA

- A, Wandira. (2013), “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” 45.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangun Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afandi, Muslim, dan Syed Agung. (2018), *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Yogyakarta: Tunas Gemilang.
- Agama RI, Departemen. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ariadi, Wa. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asnawi, Nur, dan Masyhuri. (2011). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN-Malang Press.
- . (2019). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: Uin Malang Press.
- Fatihudin, Didin. (2019). *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzan, Muhammad. (2017), “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khottab.” *Jurnal Human Falah* 4, no. 1: 55.
- Firdausy, Carunia Mulia. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Puastaka Kobor Indonesia, 2017.
- Gozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Hartiningsih, Nina, dan Edyanus Herman Halim. (2015). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau.” *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* 7, no. 2: 260.
- Hayati Lubis, Rini, dan Fitriani. (2018), “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 6, no. 2: 120.

Hidayat, Muhammad Jamil, Alfian Futuhul Hadi, dan Dian Anggraeni. (2018) “Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Timur Tahun 2006-2015” 18, no. 2 (2018).

J, Asmara, dan Nufus H. (2017), “Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi Pada Kab/kota di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 9: 5.

Juniawan, dan Suryantini. “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen*, t.t., 1255.

kawedar. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Masnila, Nelly. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok: Cendekia Media.

Matondang, Zulaika, dan Hamni Fadhilah Nasution. (2021). *Praktis Analisis Data: Pengelolaan Ekonometrika Dengan Eviews dan SPSS*. Medan: Cv Merdeka Kreasi Group.

Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Fatuhul Hadi, dan Dian Anggraeni. (2018), “Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” 18, no. 2: 70.

Muliono, Resa Dwi Ayu Pengasti, Galih Wicaksono, dan Nitri Mirosea. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Nasution, Khoiriyah, Delima Sari Lubis, dan Hamni Fadilah Nasution. (2019). “Determinan Keputusan Pembelian Masyarakat di Pasar Raya Kodok Kota Padangsidempuan.” *Journal of Islamic Business Management*, 6.

Priyanto, Dwi. (2014), *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Purwaningsih, Esti. (2011). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*. Surakarta.

Riyadi, Wulan. (2020), “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 3, no. 1: 300.

- Roflin, Eddy. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Manajement.
- Sadat, Anwar. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sahrial Eendi Nasution, Kamaluddin, dan Rodame Monitorir Napitupulu. (2021), "Determinan Minat Berinfak Generasi Z di IAIN Padangsidimuan." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1: 49.
- Sianipar, Eva Septriani. (2017). "Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 40.
- Sriyana, Jaka. (2014), *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarjo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Supriadi, Iman. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tambunan, Toman Sony. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintah*. Jakarta: Kencana.
- "Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1," 2004.
- Usman, Husaini, dan Setiadi. (2018). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Yogi Arianto Nst
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Mondang, 7 oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 3 (tiga) dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : Desa Mondang, Kecamatan Sosa
Telepon/No. Hp : 081396146767
Email : yogiarianto4b@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Hamzah Nasution
Ibu : Siti Romayan Hasibuan
Alamat : Desa Mondang, Kecamatan Sosa
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 0407 Mondang
Tahun 2012-2016 : MTSS Darul Falah Sosa
Tahun 2016-2019 : SMK Negeri 1 Pangkatan

LAMPIRAN 1

Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	135.870.920	108.954.526	112.273.586	91.986.343	236.967.852
2	PEMATANG SIANTAR	137.052.839	125.018.502	140.047.128	137.849.088	138.279.200
3	SIBOLGA	81.245.733	69.312.217	79.539.316	76.263.787	118.845.979
4	TEBING TINGGI	114.048.354	105.239.918	90.981.301	82.930.324	109.904.586
5	PADANG SIDIMPUAN	75.063.575	87.432.283	64.004.142	59.865.657	98.149.646
6	TAPSEL	140.044.217	167.458.157	132.010.127	134.093.420	125.010.000
7	PADANG LAWAS	47.455.308	52.067.312	44.055.621	46.759.858	46.930.000
8	PADANG LAWAS UTARA	74.306.097	42.929.111	51.975.624	43.312.600	43.150.000
9	LABUHAN BATU SELATAN	52.209.768	75.687.647	55.858.593	63.254.710	53.860.000
10	LABUHAN BATU	162.794.472	175.335.685	161.486.609	238.194.215	184.400.000

LAMPIRAN 2
Data Dana Perimbangan

Data Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	714.374.160	722.172.307	665.811.316	697.334.363	668.010.000
2	PEMATANG SIANTAR	796.804.963	786.015.109	697.311.630	690.917.607	747.430.000
3	SIBOLGA	512.639.624	786.015.109	464.208.154	479.222.245	417.000.000
4	TEBING TINGGI	540.901.919	547.285.111	507.071.491	540.809.856	488.710.000
5	PADANG SIDIMPUAN	641.431.373	720.460.184	603.846.645	662.957.395	538.590.000
6	TAPSEL	940.110.738	976.668.586	833.089.565	1.258.196.399	1.129.980.000
7	PADANG LAWAS	706.290.658	759.871.292	674.300.166	939.067.861	940.420.000
8	PADANG LAWAS UTARA	700.703.635	763.032.737	695.572.535	1.014.560.411	1.035.820.000
9	LABUHAN BATU SELATAN	713.753.018	714.150.631	641.993.802	787.049.332	739.480.000
10	LABUHAN BATU	928.906.312	925.148.005	803.359.127	953.988.763	957.040.000

LAMPIRAN 3

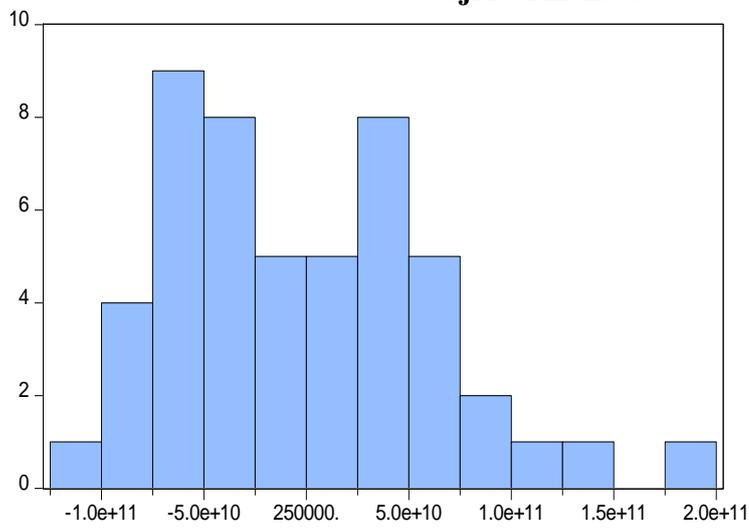
Data Belanja Modal

Data Dana Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	214.254.227	127.213.320	102.215.809	134.550.395	85.610.000
2	PEMATANG SIANTAR	287.958.994	204.959.071	159.563.471	103.469.956	97.800.000
3	SIBOLGA	142.467.823	81.569.259	86.041.237	87.104.769	129.760.000
4	TEBING TINGGI	203.340.069	153.577.322	149.776.465	169.669.665	132.550.000
5	PADANG SIDIMPUAN	113.072.061	137.812.393	66.379.049	102.576.205	75.910.000
6	TAPSEL	363.140.233	420.660.057	315.936.844	236.974.942	310.690.000
7	PADANG LAWAS	204.458.003	241.420.449	143.366.541	145.733.333	133.490.000
8	PADANG LAWAS UTARA	196.036.175	247.484.629	152.155.180	159.569.318	337.950.000
9	LABUHAN BATU SELATAN	219.379.315	220.503.868	136.042.412	146.677.444	217.590.000
10	LABUHAN BATU	139.178.414	238.729.009	136.621.343	135.676.696	181.050.000

LAMPIRAN 4
Uji Asumsi Dasar

Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2018 2022	
Observations 50	
Mean	2.55e-05
Median	-1.02e+10
Maximum	1.87e+11
Minimum	-1.01e+11
Std. Dev.	6.60e+10
Skewness	0.599372
Kurtosis	2.891472
Jarque-Bera	3.018259
Probability	0.221102

LAMPIRAN 7

Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: CHOW				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	2.917.621	(6,24)	0,19375	
Cross-section Chi-square	19.172.212	6	0.0039	

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	6.437178	2	0.0400	

LAMPIRAN 8

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

	PAD	DP
PAD	1.000000	0.345667
DP	0.345667	1.000000

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/26/23 Time: 21:03				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
R-squared	0.295561	Mean dependent var		1.75E+11
Adjusted R-squared	0.265585	S.D. dependent var		7.87E+10
S.E. of regression	6.74E+10	Akaike info criterion		52.76451
Sum squared resid	2.14E+23	Schwarz criterion		52.87923
Log likelihood	-1316.113	Hannan-Quinn criter.		52.80820
F-statistic	9.859901	Durbin-Watson stat		1.050471
Prob(F-statistic)	0.000266			

LAMPIRAN 9

Uji Hipotesis

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002

Uji F

R-squared	0.295561	Mean dependent var	1.75E+11
Adjusted R-squared	0.265585	S.D. dependent var	7.87E+10
S.E. of regression	6.74E+10	Akaike info criterion	52.76451
Sum squared resid	2.14E+23	Schwarz criterion	52.87923
Log likelihood	-1316.113	Hannan-Quinn criter.	52.80820
F-statistic	9.859901	Durbin-Watson stat	1.050471
Prob(F-statistic)	0.000266		

Uji R Square

R-squared	0.295561
Adjusted R-squared	0.265585

Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.51E+09	4.15E+10	-0.084724	0.9328
PAD	0.066163	0.227231	0.291171	0.7722
DP	0.231074	0.056952	4.057346	0.0002

Kab. Tapanuli Selatan	703,108,608,826.84	1,647,406,162,400.99	944,297,553,574.15
Kab. Tapanuli Tengah	412,301,846,002.91	1,104,547,425,899.05	692,245,579,896.14
Kab. Tapanuli Utara	661,503,357,564.81	1,242,342,253,341.63	580,838,895,776.82
Kab. Toba Samosir	326,275,099,215.74	627,835,533,422.00	301,560,434,206.26
Kota Binjai	515,871,475,486.51	663,840,631,389.51	147,969,155,903.00
Kota Medan	9,069,249,167,709.85	4,156,924,417,582.14	-4,912,324,750,127.71
Kota Pematangsiantar	616,377,380,190.32	790,971,089,098.46	174,593,708,908.14
Kota Sibolga	388,759,206,222.79	538,867,695,127.00	150,108,488,904.21
Kota Tanjung Balai	314,374,137,591.19	383,099,634,973.59	68,725,497,382.40
Kota Tebing Tinggi	481,946,725,579.36	808,908,826,758.82	326,962,101,179.46
Kota Padangsidimpuan	339,406,323,672.46	495,721,461,533.63	156,315,137,861.17
Kab. Pakpak Bharat	118,116,243,895.90	474,255,976,665.31	356,139,732,769.41
Kab. Nias Selatan	124,047,715,792.47	1,190,129,199,768.07	1,066,081,483,975.60
Kab. Humbang Hasundutar	306,732,243,248.69	757,404,206,145.31	450,671,962,896.62
Kab. Serdang Bedagai	708,680,886,078.23	1,643,061,526,999.81	934,380,640,921.58
Kab. Samosir	293,887,599,226.36	828,265,519,990.27	534,377,920,763.91
Kab. Batubara	643,516,746,830.88	845,889,279,411.00	202,372,532,580.12
Kab. Padang Lawas	237,264,873,782.27	882,308,012,186.03	645,043,138,403.76
Kab. Padang Lawas Utara	255,676,026,358.89	1,080,304,708,738.00	824,628,682,379.11
Kab. Labuhanbatu Selatan	294,149,542,817.30	933,921,895,070.16	639,772,352,252.86
Kab. Labuhanbatu Utara	292,142,950,714.12	801,267,593,060.69	509,124,642,346.57
Kab. Nias Utara	192,623,242,571.88	887,049,501,379.78	694,426,258,807.90
Kab. Nias Barat	109,105,937,634.97	784,173,462,003.46	675,067,524,368.49
Kota Gunungsitoli	133,845,427,200.80	780,593,970,564.40	646,748,543,363.60

Kota	PAD 2018	PAD 2019	PAD 2020	PAD 2021	PAD 2022	TOTAL PAD
Kab. Asahan	142,972,039,821	149,647,050,442	159,308,333,491.94	134,864,406,995	157,521,134,076	744,312,964,825.76
Kab. Dairi	128,489,751,332	74,360,339,718	89,758,997,873.48	72,268,890,301	84,618,675,421	449,496,654,645.11
Kab. Deli Serdang	729,648,594,489	825,375,281,297	809,719,829,264.82	926,137,759,153	1,041,668,145,481	4,332,549,609,684.25
Kab. Karo	159,189,197,472	117,683,657,833	100,334,824,835.96	108,359,804,241	85,513,467,274	571,080,951,656.15
Kab. Labuhanbatu	162,794,472,017	175,335,685,317	161,486,609,119.15	238,194,215,394	184,403,843,932	922,214,825,778.60
Kab. Langkat	136,680,578,541	167,523,076,880	168,843,723,199.88	158,480,919,772	138,928,796,729	770,457,095,121.96
Kab. Mandailing Natal	84,809,923,496	98,758,815,328	90,454,777,184.54	142,409,606,087	93,998,645,256	510,431,767,351.80
Kab. Nias	88,754,606,115	107,639,139,180	103,755,392,882.00	103,944,559,551	51,942,790,094	456,036,487,821.29
Kab. Simalungun	164,107,850,129	191,940,130,095	159,319,208,782.63	177,646,004,174	158,095,359,457	851,108,552,638.04
Kab. Tapanuli Selatan	140,044,217,234	167,458,157,940	132,010,127,162.00	134,093,420,731	129,502,685,760	703,108,608,826.84
Kab. Tapanuli Tengah	76,660,883,410	88,441,123,323	87,469,317,632.21	84,473,837,625	75,256,684,012	412,301,846,002.91
Kab. Tapanuli Utara	105,656,762,964	113,990,759,582	133,375,094,966.00	162,791,620,432	145,689,119,621	661,503,357,564.81
Kab. Toba Samosir	52,298,960,803	68,046,526,605	57,403,162,933.28	75,305,600,200	73,220,848,674	326,275,099,215.74
Kota Binjai	135,870,920,433	108,954,526,370	112,273,586,101.62	91,986,343,406	66,786,099,176	515,871,475,486.51
Kota Medan	1,636,204,514,684	1,829,665,882,248	1,509,483,588,167.01	1,906,512,189,047	2,187,382,993,564	9,069,249,167,709.85
Kota Pematangsiantar	113,424,719,193	125,018,502,648	140,047,128,354.00	137,849,088,370	100,037,941,626	616,377,380,190.32
Kota Sibolga	81,245,733,812	69,312,217,832	79,539,316,412.03	76,263,787,133	82,398,151,034	388,759,206,222.79
Kota Tanjung Balai	74,435,277,572	63,721,315,845	63,478,937,585.51	58,650,167,941	54,088,438,648	314,374,137,591.19
Kota Tebing Tinggi	114,048,354,143	105,239,918,352	90,981,301,747.13	82,930,324,048	88,746,827,290	481,946,725,579.36
Kota Padangsidimpuan	75,063,575,093	87,432,283,185	64,004,142,634.59	59,865,657,758	53,040,665,002	339,406,323,672.46
Kab. Pakpak Bharat	20,061,207,923	33,915,957,645	21,690,799,282.98	24,443,194,479	18,005,084,566	118,116,243,895.90
Kab. Nias Selatan	19,605,734,782	25,664,883,761	16,598,894,145.70	32,822,654,372	29,355,548,731	124,047,715,792.47
Kab. Humbang Hasundut	92,735,853,813	73,757,931,630	67,936,178,388.72	26,917,795,029	45,384,484,388	306,732,243,248.69
Kab. Serdang Bedagai	194,382,972,213	143,144,170,557	120,028,357,474.00	133,466,455,515	117,658,930,319	708,680,886,078.23
Kab. Samosir	47,446,623,389	60,497,449,963	60,373,806,629.91	61,871,566,524	63,698,152,720	293,887,599,226.36
Kab. Batubara	64,385,292,862	129,221,846,897	166,023,316,040.82	174,549,720,181	109,336,570,850	643,516,746,830.88
Kab. Padang Lawas	47,455,308,607	52,067,312,091	44,055,621,274.00	46,759,858,387	46,926,773,423	237,264,873,782.27
Kab. Padang Lawas Utara	74,306,097,500	42,929,111,658	51,975,624,588.01	43,312,600,311	43,152,592,302	255,676,026,358.89
Kab. Labuhanbatu Selata	52,209,768,574	75,687,647,545	55,858,593,110.00	63,254,710,984	47,138,822,604	294,149,542,817.30
Kab. Labuhanbatu Utara	57,010,690,546	70,122,562,532	55,494,095,702.23	58,863,185,741	50,652,416,193	292,142,950,714.12
Kab. Nias Utara	50,395,504,636	57,961,363,630	58,878,959,974.09	20,175,811,945	5,211,602,387	192,623,242,571.88
Kab. Nias Barat	40,193,008,207	18,411,235,998	19,578,221,852.68	18,267,918,507	12,655,553,070	109,105,937,634.97
Kota Gunungsitoli	29,456,354,563	32,209,121,389	25,530,252,953.00	21,417,950,730	25,231,747,566	133,845,427,200.80

Kota	Belanja Modal 2018	Belanja Modal 2019	Belanja Modal 2020	Belanja Modal 2021	Belanja Modal 2022	Total Belanja Modal
Kab. Asahan	230,200,116,402	304,478,575,305	146,983,023,065.25	192,281,525,138	298,635,757,197	1,172,578,997,107.06
Kab. Dairi	260,705,968,964	197,567,865,963	139,598,777,988.80	177,886,901,012	172,288,707,597	948,048,221,524.80
Kab. Deli Serdang	670,584,193,041	703,280,070,640	480,305,325,651.90	520,913,969,424	563,480,586,116	2,938,564,144,873.10
Kab. Karo	222,116,791,413	196,427,858,444	131,636,983,833.00	187,057,684,057	49,508,557,635	786,747,875,381.54
Kab. Labuhanbatu	139,178,414,287	238,729,009,917	136,621,343,879.00	135,676,696,803	181,049,989,419	831,255,454,305.30
Kab. Langkat	380,576,043,929	346,035,976,277	296,125,002,688.86	279,596,218,685	301,759,351,737	1,604,092,593,316.95
Kab. Mandailing Natal	199,849,014,897	206,392,843,128	138,152,200,874.64	217,236,641,546	191,102,999,383	952,733,699,828.36
Kab. Nias	207,016,876,763	190,454,026,585	145,345,768,616.00	103,446,741,624	159,577,931,886	805,841,345,474.28
Kab. Simalungun	405,283,313,970	381,344,591,277	103,882,357,774.00	216,399,047,438	352,656,353,512	1,459,565,663,971.00
Kab. Tapanuli Selatan	363,140,233,295	420,660,057,835	315,936,844,132.00	236,974,942,898	310,694,084,241	1,647,406,162,400.99
Kab. Tapanuli Tengah	220,747,371,092	219,450,399,720	244,316,439,358.00	213,498,667,879	206,534,547,850	1,104,547,425,899.05
Kab. Tapanuli Utara	181,662,031,464	194,947,102,075	339,159,979,339.00	287,918,257,694	238,654,882,770	1,242,342,253,341.63
Kab. Toba Samosir	152,970,216,966	135,339,350,834	66,583,199,217.00	117,113,376,689	155,829,389,716	627,835,533,422.00
Kota Binjai	214,254,227,113	127,213,320,411	102,215,809,259.11	134,550,395,878	85,606,878,728	663,840,631,389.51
Kota Medan	753,996,886,210	992,661,245,695	308,278,278,057.33	574,604,617,139	1,527,383,390,481	4,156,924,417,582.14
Kota Pematangsiantar	287,958,994,695	204,959,071,624	159,563,471,559.00	103,469,956,422	35,019,594,798	790,971,089,098.46
Kota Sibolga	142,467,823,362	81,569,259,159	86,041,237,376.00	87,104,769,378	141,684,605,852	538,867,695,127.00
Kota Tanjung Balai	120,913,101,870	96,299,502,046	53,907,690,820.07	44,390,581,071	67,588,759,167	383,099,634,973.59
Kota Tebing Tinggi	203,340,069,233	153,577,322,072	149,776,465,844.42	169,669,665,003	132,545,304,607	808,908,826,758.82
Kota Padangsidempuan	113,072,061,374	137,812,393,424	66,379,049,476.14	102,576,205,916	75,881,751,344	495,721,461,533.63
Kab. Pakpak Bharat	118,336,626,935	145,937,021,774	63,702,287,295.00	63,660,632,079	82,619,408,582	474,255,976,665.31
Kab. Nias Selatan	221,305,834,645	238,978,343,319	293,434,513,125.26	245,107,576,769	191,302,931,909	1,190,129,199,768.07
Kab. Humbang Hasunduta	168,860,963,829	177,278,522,408	118,464,935,599.00	132,965,658,863	159,834,125,446	757,404,206,145.31
Kab. Serdang Bedagai	349,104,338,217	313,357,351,131	235,397,764,582.90	399,621,275,794	345,580,797,275	1,643,061,526,999.81
Kab. Samosir	186,281,849,902	164,093,834,379	107,966,580,638.27	213,892,176,771	156,031,078,300	828,265,519,990.27
Kab. Batubara	139,977,493,680	222,600,369,777	208,230,711,434.00	145,733,333,116	129,347,371,404	845,889,279,411.00
Kab. Padang Lawas	204,458,003,516	241,420,449,752	143,366,541,808.00	159,569,318,033	133,493,699,077	882,308,012,186.03
Kab. Padang Lawas Utara	196,036,175,259	247,484,629,027	152,155,180,883.00	146,677,444,323	337,951,279,246	1,080,304,708,738.00
Kab. Labuhanbatu Selatan	219,379,315,619	220,503,868,788	136,042,412,266.00	140,402,459,491	217,593,838,906	933,921,895,070.16
Kab. Labuhanbatu Utara	223,037,632,088	258,116,878,081	103,416,243,036.59	118,782,060,608	97,914,779,247	801,267,593,060.69
Kab. Nias Utara	192,092,726,869	258,215,519,657	177,992,760,575.78	118,782,060,608	139,966,433,670	887,049,501,379.78
Kab. Nias Barat	247,896,475,505	180,915,741,154	123,093,821,387.08	67,159,494,105	165,107,929,852	784,173,462,003.46
Kota Gunungsitoli	183,521,284,315	156,757,286,042	145,877,614,736.00	148,806,251,974	145,631,533,497	780,593,970,564.40

Jenis data

apbd

Tahun

2018

Wilayah

Prov. Sumatera Utara

Sub-wilayah

Prov. Sumatera Utara

SUBMIT

POSTUR APBD

Sumut

Tahun 2018

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2018, per 08 Desember 2023



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	13.037,54 M	12.703,06 M	97.43
PAD	5.732,43 M	5.638,96 M	98.37
Pajak Daerah	5.214,90 M	5.219,32 M	100.08
Retribusi Daerah	37,60 M	36,61 M	97.39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318,42 M	192,00 M	60.30
Lain-Lain PAD yang Sah	161,52 M	191,03 M	118.27
TKDD *)	7.295,58 M	7.055,13 M	96.70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.295,58 M	7.055,13 M	96.70
PAD	5.732,43 M	5.638,96 M	98.37
Pajak Daerah	5.214,90 M	5.219,32 M	100.08
Retribusi Daerah	37,60 M	36,61 M	97.39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318,42 M	192,00 M	60.30
Lain-Lain PAD yang Sah	161,52 M	191,03 M	118.27
TKDD *)	7.295,58 M	7.055,13 M	96.70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.295,58 M	7.055,13 M	96.70
Pendapatan Lainnya	9,53 M	8,96 M	94.02
Pendapatan Hibah	9,53 M	8,96 M	94.02
Belanja Daerah	13.867,54 M	12.563,39 M	90.60
Belanja Pegawai	3.594,92 M	3.584,40 M	99.71
Belanja Pegawai	3.594,92 M	3.584,40 M	99.71
Belanja Barang Jasa	2.520,52 M	2.098,06 M	83.24
Belanja Barang dan Jasa	2.520,52 M	2.098,06 M	83.24
Belanja Modal	1.900,43 M	1.564,90 M	82.34
Belanja Modal	1.900,43 M	1.564,90 M	82.34
Belanja Lainnya	5.851,67 M	5.316,03 M	90.85
Belanja Hibah	2.631,01 M	2.165,07 M	82.28

Jenis data:
 Tahun:
 Wilayah:
 Sub-wilayah:

POSTUR APBD

Sumut

Tahun 2019

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 08 Desember 2023



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	15.327,75 M	13.079,60 M	85.33
PAD	7.583,85 M	5.761,27 M	75.97
Pajak Daerah	6.087,37 M	5.058,44 M	83.10
Retribusi Daerah	36,74 M	38,41 M	104.53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612,18 M	436,28 M	71.27
Lain-Lain PAD yang Sah	847,56 M	228,13 M	26.92
TKDD *)	7.736,05 M	7.300,65 M	94.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.736,05 M	7.300,65 M	94.37
PAD	7.583,85 M	5.761,27 M	75.97
Pajak Daerah	6.087,37 M	5.058,44 M	83.10
Retribusi Daerah	36,74 M	38,41 M	104.53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612,18 M	436,28 M	71.27
Lain-Lain PAD yang Sah	847,56 M	228,13 M	26.92
TKDD *)	7.736,05 M	7.300,65 M	94.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.736,05 M	7.300,65 M	94.37
Pendapatan Lainnya	7,85 M	17,68 M	225.17
Pendapatan Hibah	7,85 M	17,68 M	225.17
Belanja Daerah	15.543,91 M	13.440,32 M	86.47
Belanja Pegawai	3.753,82 M	3.442,66 M	91.71
Belanja Pegawai	3.753,82 M	3.442,66 M	91.71
Belanja Barang Jasa	3.174,88 M	2.477,24 M	78.03
Belanja Barang dan Jasa	3.174,88 M	2.477,24 M	78.03
Belanja Modal	1.796,37 M	1.249,60 M	69.56
Belanja Modal	1.796,37 M	1.249,60 M	69.56
Belanja Lainnya	6.818,83 M	6.270,82 M	91.96

Jenis data	Tahun	Wilayah	Sub-wilayah	
apbd	2020	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Utara	SUBMIT

POSTUR APBD

Sumut

Tahun 2020

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2020, per 08 Desember 2023



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	13.880,97 M	12.916,36 M	93.05
PAD	5.967,65 M	5.531,24 M	92.69
Pajak Daerah	5.412,95 M	5.071,60 M	93.69
Retribusi Daerah	39,92 M	30,22 M	75.70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	314,47 M	242,31 M	77.05
Lain-Lain PAD yang Sah	200,31 M	187,11 M	93.41
TKDD *)	7.904,25 M	7.347,75 M	92.96
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.904,25 M	7.347,75 M	92.96
Pendapatan Lainnya	9,07 M	37,37 M	412.16
PAD	5.967,65 M	5.531,24 M	92.69
Pajak Daerah	5.412,95 M	5.071,60 M	93.69
Retribusi Daerah	39,92 M	30,22 M	75.70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	314,47 M	242,31 M	77.05
Lain-Lain PAD yang Sah	200,31 M	187,11 M	93.41
TKDD *)	7.904,25 M	7.347,75 M	92.96
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.904,25 M	7.347,75 M	92.96
Pendapatan Lainnya	9,07 M	37,37 M	412.16
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pendapatan Hibah	9,07 M	27,50 M	303.28
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	9,87 M	0
Belanja Daerah	14.080,97 M	12.653,61 M	89.86
Belanja Pegawai	3.766,07 M	3.257,13 M	86.49
Belanja Pegawai	3.766,07 M	3.257,13 M	86.49
Belanja Barang Jasa	2.979,11 M	1.963,12 M	65.90
Belanja Barang dan Jasa	2.979,11 M	1.963,12 M	65.90
Belanja Modal	2.365,81 M	1.497,94 M	63.32

Jenis data

apbd

Tahun

2021

Wilayah

Prov. Sumatera Utara

Sub-wilayah

Prov. Sumatera Utara

SUBMIT

POSTUR APBD

Sumut

Tahun 2021

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Audited 2021, - data diterima SIKD per 08 Desember 2023



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	13.517,50 M	14.034,04 M	103.82
PAD	5.991,15 M	6.402,71 M	106.87
Pajak Daerah	5.438,10 M	5.730,57 M	105.38
Retribusi Daerah	30,37 M	27,13 M	89.33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	356,27 M	384,48 M	107.92
Lain-Lain PAD yang Sah	166,42 M	260,53 M	156.55
TKDD *)	7.434,78 M	7.518,18 M	101.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.434,78 M	7.518,18 M	101.12
PAD	5.991,15 M	6.402,71 M	106.87
Pajak Daerah	5.438,10 M	5.730,57 M	105.38
Retribusi Daerah	30,37 M	27,13 M	89.33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	356,27 M	384,48 M	107.92
Lain-Lain PAD yang Sah	166,42 M	260,53 M	156.55
TKDD *)	7.434,78 M	7.518,18 M	101.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.434,78 M	7.518,18 M	101.12
Pendapatan Lainnya	91,57 M	113,14 M	123.56
Pendapatan Hibah	61,07 M	70,62 M	115.65
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30,50 M	42,52 M	139.40
Belanja Daerah	13.749,50 M	13.225,39 M	96.19
Belanja Pegawai	3.663,46 M	3.372,53 M	92.06
Belanja Pegawai	3.663,46 M	3.372,53 M	92.06
Belanja Barang Jasa	2.613,91 M	2.828,79 M	108.22
Belanja Barang dan Jasa	2.613,91 M	2.828,79 M	108.22
Belanja Modal	1.145,57 M	1.141,20 M	99.62
Belanja Modal	1.145,57 M	1.141,20 M	99.62

Jenis data

apbd

Tahun

2022

Wilayah

Prov. Sumatera Utara

Sub-wilayah

Prov. Sumatera Utara

SUBMIT

POSTUR APBD

Sumut

Tahun 2022

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2022, - data diterima SIKD per 08 Desember 2023



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	12.011,63 M	12.594,41 M	104.85
PAD	6.819,01 M	7.258,02 M	106.44
Pajak Daerah	6.227,77 M	6.646,50 M	106.72
Retribusi Daerah	68,42 M	28,95 M	42.32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	354,76 M	302,40 M	85.24
Lain-Lain PAD yang Sah	168,06 M	280,16 M	166.70
TKDD *)	5.093,35 M	5.250,01 M	103.08
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.093,35 M	5.250,01 M	103.08
PAD	6.819,01 M	7.258,02 M	106.44
Pajak Daerah	6.227,77 M	6.646,50 M	106.72
Retribusi Daerah	68,42 M	28,95 M	42.32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	354,76 M	302,40 M	85.24
Lain-Lain PAD yang Sah	168,06 M	280,16 M	166.70
TKDD *)	5.093,35 M	5.250,01 M	103.08
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.093,35 M	5.250,01 M	103.08
Pendapatan Lainnya	99,27 M	86,38 M	87.02
Pendapatan Hibah	74,27 M	73,03 M	98.34
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25,00 M	13,35 M	53.39
Belanja Daerah	12.649,63 M	12.509,06 M	98.89
Belanja Pegawai	3.390,52 M	3.392,78 M	100.07
Belanja Pegawai	3.390,52 M	3.392,78 M	100.07
Belanja Barang Jasa	2.532,33 M	2.964,82 M	117.08
Belanja Barang dan Jasa	2.532,33 M	2.964,82 M	117.08
Belanja Modal	1.891,24 M	1.775,92 M	93.90
Belanja Modal	1.891,24 M	1.775,92 M	93.90